

# Workshop & Pelatihan Advokasi Reformasi Sektor Keamanan untuk Ahli Sipil

Kerjasama :

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)  
Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)  
Jakarta-Bali-Samarinda-Makassar, Agustus-November 2009

## Informasi

Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS)

Jl. Teluk Peleng B32 Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Jakarta Indonesia

Tel/Fax: +62 21 780 41 91

Email: [info@idsps.org](mailto:info@idsps.org) Website: [www.idsps.org](http://www.idsps.org)

Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Rue de Chantepoulet 11 CH-1201 Geneva 1

Switzerland

Website: <http://www.dcaf.ch>



# PENGANTAR

Penelitian *Institute for Defense Security and Peace Studies* (IDSPS) tentang *Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006* (Jakarta: IDSPS, 2008), menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah berperan aktif mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses Reformasi Sektor Keamanan (RSK) paska 1998. Beberapa bentuk advokasi yang dilakukan antara lain adalah (1) Pengembangan wacana RSK, (2) Advokasi legislasi dan kebijakan di sektor keamanan, (3) Pewacanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan di sektor keamanan; dan (4) Melakukan pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan aktor keamanan, pemerintah dan parlemen.

Di sisi lain, penelitian IDSPS juga menemukan fakta bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) belum bisa menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan skill dan pengetahuan yang memadai, penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang solid dan konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim pada tahun 1997-1998, maka penelitian IDSPS merekomendasikan OMS untuk melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya, seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis.

Dalam rekomendasi IDSPS minimal ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. *Pertama*, menguatkan pengaruh di internal aktor keamanan, parlemen dan pemerintah. *Kedua*, menjaga konsistensi peran dalam kebijak-kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan. *Ketiga*, memperkuat wacana dan pemahaman wacana dan isu RSK.

Karenanya, pengetahuan dan keahlian kalangan OMS merupakan salah satu kebutuhan mendesak. Berdasarkan pandangan ini, *Institute for Defense, Security and Peace Studies* (IDSPS), bekerjasama dengan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Force*) menyelenggarakan workshop dan pelatihan Advokasi Reformasi Sektor Keamanan untuk Ahli Sipil yang melibatkan peserta dari seluruh propinsi di Indonesia.

# TUJUAN

1. Adanya pengembangan keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowlegde*) praktisi advokasi dari kalangan OMS, sehingga mampu untuk menjadi ahli-ahli sipil untuk isu-isu RSK.
2. Adanya penyebaran wacana-wacana dan isu-isu RSK secara nasional, sehingga advokasi RSK menjadi milik dan perhatian publik secara nasional.
3. Adanya jaringan advokasi yang bersifat nasional dalam rangka tindak lanjut dan penguatan advokasi RSK, dimana ahli-ahli sipil dari kalangan OMS dapat berperan signifikan sebagai individu, organisasi dalam satu jaringan yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

# PERSYARATAN PESERTA

- ✓ Praktisi organisasi masyarakat sipil (Aktivis LSM/Ormas, Pengacara, Akademisi, Jurnalis), dengan pengalaman bekerja minimum 3 tahun di lembaga atau profesi yang bersangkutan (dibuktikan dengan data CV yang dikirimkan ke IDSPS).
- ✓ Mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga atau institusi dimana yang bersangkutan bekerja.

- ✓ Rekomendasi yang diberikan oleh lembaga atau institusi lain (lokal atau nasional) yang bekerja dalam isu-isu RSK atau memiliki kerjasama dengan IDSPS dapat menjadi nilai tambah dalam pertimbangan penerimaan oleh IDSPS.
- ✓ Menyatakan kesediaan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pelatihan dan Workshop sebagaimana ditetapkan IDSPS (pelanggaran terhadap pernyataan ini berakibat pada hilangnya hak yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dan permintaan penggantian pembiayaan yang dikeluarkan IDSPS).
- ✓ Melengkapi dokumen, mengirimkan seluruh dokumen tersebut sebelum tanggal akhir penerimaan dan lolos proses seleksi yang dilakukan oleh IDSPS.
- ✓ Dalam proses seleksi, IDSPS dapat melakukan komunikasi via telepon atau email terhadap calon peserta, termasuk meminta kelengkapan tambahan.
- ✓ Keputusan yang diambil IDSPS bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat.

# TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini di bagi menjadi 4 kali Pelatihan dan Workshop, dengan pembagian berdasarkan zona atau wilayah sebagai berikut:

## 1. Pelatihan dan Workshop I

### Wilayah Papua-Maluku-Makassar

- **Peserta** : Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
- **Waktu Kegiatan** : 17-19 Agustus 2009
- **Tempat Kegiatan** : Ujung Pandang

## 2. Pelatihan dan Workshop II

### Wilayah Sulawesi-Kalimantan

- **Peserta** : Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
- **Waktu Kegiatan** : 5-7 Oktober 2009
- **Tempat Kegiatan** : Samarinda/Balikpapan

## 3. Pelatihan dan Workshop III

### Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

- **Peserta** : Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- **Waktu Kegiatan** : 19-21 Oktober 2009
- **Tempat Kegiatan** : Bali

## 4. Pelatihan dan Workshop IV

### Wilayah Sumatera

- **Peserta** : Provinsi DI Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung
- **Waktu Kegiatan** : 16-18 November 2009
- **Tempat Kegiatan** : Jakarta/Bogor

Peserta dari provinsi-provinsi di atas hanya dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan zona atau wilayah pelatihan yang telah ditentukan, kecuali dengan pertimbangan khusus IDSPS.

# PROSEDUR DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Mengisi Formulir
2. Melampirkan CV Lengkap berikut Surat Rekomendasi
3. Mengirimkan seluruh dokumen ( Formulir yang telah diisi, CV Lengkap dan surat rekomendasi) melalui email ke [info@idsps.org](mailto:info@idsps.org) (dengan format judul: Pelatihan RSK\_Nama\_Provinsi), atau via pos ke alamat:

## **Panitia Pelatihan RSK**

**Jl. Teluk Peleng B32 Komplek TNI AL  
Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
12520**

4. Formulir Pendaftaran dapat diunduh di website IDSPS, melalui link (<http://www.idsps.org>)
5. Hanya calon peserta yang dianggap memenuhi persyaratan dan kualifikasi IDSPS yang akan dihubungi pihak IDSPS.
6. Pemberitahuan penerimaan peserta akan disampaikan secara langsung oleh panitia melalui email atau telepon, selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

Adapun **waktu pendaftaran** untuk masing-masing zona atau wilayah adalah sebagai berikut:

### **1. Zona I Papua-Maluku-Makassar**

Pembukaan Pendaftaran 13 Juli 2009

Penutupan Pendaftaran 31 Juli 2009

### **2. Zona II Sulawesi-Kalimantan**

Pembukaan Pendaftaran 31 Agustus 2009

Penutupan Pendaftaran 18 September 2009

### **3. Zona III Jawa-Bali-Nusa Tenggara**

Pembukaan Pendaftaran 14 September 2009

Penutupan Pendaftaran 2 Oktober 2009

### **4. Zona IV Sumatera**

Pembukaan Pendaftaran 12 Oktober 2009

Penutupan Pendaftaran 30 Oktober 2009

Pengiriman Dokumen Peserta di luar waktu pendataran tersebut atau sebelum waktu pembukaan pendaftaran di masing-masing zona tidak akan dilayani (pihak IDSPS akan menghapus email atau menyatakan tidak menerima pengiriman dokumen di luar ketentuan waktu di atas).

# MATERI PELATIHAN

Adapun materi pelatihan dan wokshop ini adalah sebagai berikut:

- I. Pengantar dan Pengenalan Kerangka dan Paradigma Reformasi Sektor Keamanan
- II. Peran Parlemen dalam Reformasi Sektor Keamanan
- III. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil dalam Reformasi Sektor Keamanan
- IV. Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- V. Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- VI. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara (BIN)
- VII. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah
- VIII. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Sektor Keamanan
- IX. Polisi Pamongpraja dan Milisi-milisi Sipil di Masyarakat
- X. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-tugas Kepolisian
- XI. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan
- XII. Peran Pasukan Penjaga Perdamaian di Sektor Keamanan
- XIII. Pengawasan Anggaran Pertahanan dan Pengadaan di Sektor Keamanan
- XIV. Program Pemolisian Masyarakat
- XV. Komisi Pengawas Intelijen
- XVI. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan
- XVII. Manajemen Perbatasan

# PROFIL IDSPS DAN DCAF

## IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta beperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B32 Komplek TNI AL Rawabambu,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Jakarta Indonesia  
Tel/Fax: +62 21 780 41 91  
Email: [info@idsps.org](mailto:info@idsps.org)  
Website: [www.idsps.org](http://www.idsps.org)

## DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantua di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Rue de Chantepoulet 11 CH-1201 Geneva 1  
Switzerland  
Website: <http://www.dcaf.ch>